

# **PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, DERAJAT OTONOMI FISKAL, DAN TOTAL BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN WONOSOBO PERIODE 2001-2018**

*PHYSIC DECENTRALIZED IMPACT, DEGREES FISCAL AUTONOMY, AND TOTAL MANAGEMENT OF THE REGION GROWTH ECONOMICS IN WONOSOBO PERIOD 2001-2018*

<sup>1)</sup>Arif Budi Astuti, <sup>2)</sup>Whinarko Juliprijanto, <sup>3)</sup>Yustirania Septiani  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia  
[arifbudiastuti14@gmail.com](mailto:arifbudiastuti14@gmail.com)

## **Abstrak**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting dalam meningkatkan perekonomian daerah sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Namun, Khususnya di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2001-2018 yang memiliki kemampuan keuangan daerah yang sebagian besar dalam kategori sangat kurang, kemandirian keuangan daerah yang masih bergantung sama fungsi pemerintah pusat daripada pemerintah daerah, dan pembiayaan daerah dalam komposisinya belanja tidak langsung (belanja rutin) memiliki prosentase penggunaannya paling besar daripada belanja langsung (belanja pembangunan) dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal, dan total belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pencapaian tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Penelitian ini menggunakan teknik estimasi *Error Correction Model* (ECM) Engle dan Granger untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada periode 2001- 2018 di Kabupaten Wonosobo. Hasil Penelitian menyatakan variabel derajat desentralisasi fiskal dan derajat otonomi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, variabel total belanja daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan secara simultan variabel derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal dan total belanja daerah secara bersama dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo periode 2001-2018.

**Kata kunci:** Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

## *Abstract*

*Economic growth is one of the most important indicators in improving the regional economy so that the welfare of the community is achieved better. Efforts to increase economic growth can not be separated from effective and efficient regional financial management. However, especially in Wonosobo Regency during 2001-2018 which has regional financial capabilities that are mostly in the category of severely lacking, regional financial independence that still depends on the function of the central government rather than the local government, and regional financing in its composition direct expenditure (routine shopping) has the percentage of its use is greater than direct spending (development spending) in the management of regional finance. The purpose of this study was to analyze whether there is an influence of the degree of fiscal decentralization, degree of fiscal autonomy, and total regional spending on economic growth in achieving the level of regional prosperity and independence. This study used Engle and Granger Error Correction Model (ECM) estimation techniques to determine the short-term and long-term effects in the period 2001-2018 in Wonosobo Regency. The results stated that variable degrees of fiscal decentralization and degrees of fiscal autonomy have no significant influence on economic growth in the short or long term, variable total regional spending has a significant influence on economic growth in the short and long term. While simultaneously variable degrees of fiscal decentralization, degrees of fiscal autonomy and total regional spending together in the short and long term have a significant effect on economic growth in Wonosobo regency in the period 2001-2018.*

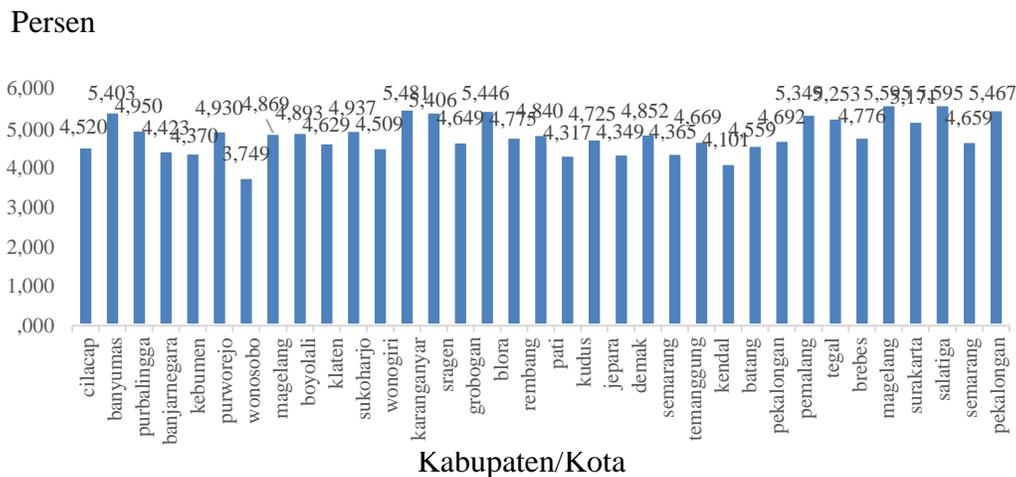
*Keywords:* Regional Financial Management, Economic Growth

**PENDAHULUAN**

Berawal diberlakukannya peraturan otonomi daerah di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, peningkatkan efisien dan efektivitas dalam pemanfaatan potensi dan keanekaragaman daerah serta mampu dalam menghadapi peluang dan tantangan persaingan global, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Potensi daerah berupa SDA yang ada di daerah sebagai faktor penunjang terpenting modal pengembangan daerah (Destinigsih,

2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu negara atau daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Daerah Kabupaten Wonosobo yang memiliki kelebihan baik dalam geo-ekonomi maupun dalam potensi wisatanya namun dalam kenyataannya kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten Wonosobo menempati urutan terendah di Karesidenan Kedu maupun di provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2018. Rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur ekonomi yang terbatas, dan masih relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Maka dapat ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2019 (data diolah)

**Gambar 1.** Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Jawa Tengah tahun 2001-2018

Upaya untuk mendorong perkembangan atau pertumbuhan ekonomi tersebut Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan otonomi daerah dituntut untuk efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangannya serta mengurus pemerintah daerahnya dengan baik yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam perkembangan masa otonomi daerah, setiap daerah mengalami permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Khususnya Kabupaten Wonosobo memiliki masalah dalam kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerahnya dalam pembiayaannya sebagian besar masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut dapat ditunjukkan derajat desentralisasi fiskal (kemampuan keuangan daerah) Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2001-2018 tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo dalam nilai skala interval antara 0,00-10,00 persen yaitu sebagian besar termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal tersebut menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang dalam melakukan pembiayaan pembangunan

daerah. Serta masih relatif besar total bantuan pemerintah pusat/provinsi daripada total Pendapatan Asli Daerahnya. Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2018 mempunyai nilai skala interval berada di antara 0-25 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo dalam tingkat kemandirian keuangan daerahnya termasuk dalam kategori instruktif. Maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan atau daerah yang tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Selain itu indikator dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak kalah penting adalah total belanja daerah. Salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang juga menjadi tolak ukur dalam mengatur pembiayaan pembangunan daerahnya. Salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang juga menjadi tolak ukur dalam mengatur pembiayaan pembangunan daerahnya. Suatu daerah dapat dikatakan maju jika pembangunan daerah berjalan dengan baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Total belanja daerah di Kabupaten Wonosobo selama 2001-2018 meskipun meningkat setiap tahunnya namun dalam pembiayaannya dalam bagian pembangunan atau belanja modal masih

rendah dibanding dengan belanja rutinnya. Belanja tidak langsung (belanja rutin) masih mendominasi sebesar 66 persen dari pada belanja langsung (belanja pembangunan) sebesar 34 persen dari rata-rata total belanja daerah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal dan total belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten wonosobo periode 2001-2018”.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan metode kuantitatif. Data yang dipakai adalah data sekunder berupa data *time series* tahun 2001-2018 di Kabupaten Wonosobo. Sumber data sekunder yang diambil dari data APBD yang diakses dari DJPK Kementerian Keuangan dan data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari BPS Jateng dengan mengolah data PDRB Jateng dari tahun 2000-2018. Penelitian ini diolah dengan menggunakan alat analisis *e-views 10*. Variabel independen yang digunakan adalah derajat desentralisasi fiskal yang diperoleh dari membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah dikali 100% , serta derajat otonomi fiskal yang diperoleh dari

membandingkan total PAD dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dikali 100%, serta total belanja daerah. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi.

## Teknik Analisis Data

### 1. Metode ECM

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode ECM (*Error Correction Model*) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Model ECM adalah bagaimana data *time series* seringkali menyatakan kondisi tidak stasioner pada tingkat level, namun seringkali menunjukkan stasioner melalui proses differensi. Stasioner data pada proses diferensi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara variabel yang diteliti. Namun dalam jangka pendek mungkin menunjukkan adanya ketidakseimbangan sehingga perlu membentuk model yang memasukkan variabel penyesuaian untuk mengoreksi ketidakseimbangan tersebut (Widarjono, 2018: 267). Tahapan-tahapan uji dalam model ECM adalah uji stasioneritas, uji derajat integritas, uji kointegrasi, dan model estimasi ECM. Model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini

adalah model semilog. Menurut Gujarati (2015: 211), Model semilog adalah model dimana hanya satu variabel ( Y atau X ) yang berbentuk logaritma. Untuk tujuan deskriptif, model lin-log. Model ini untuk mencari perubahan absolut Y untuk presentase perubahan X.

**2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk pengujian memperoleh model regresi yang lebih akurat serta untuk menghindari adanya penyimpangan pada model regresi. Dalam uji ini yang dipakai adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Winarno, 2015: 5.41).

**3. Uji Statistik**

a. Koefisien Determinasi **R<sup>2</sup>**

Dalam menerangkan variasi variabel dependen, koefisien determinasi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan model (Ghozali, 2012 : 97).

b. Uji Signifikansi secara Parsial (Uji t)

Menurut Ghazali (2012: 198), uji signifikansi secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui

pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Uji Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2014 : 257), uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bersama-sama antarvariabel independen terhadap variabel dependen.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

a. Hasil Uji *Error Correction Model*

1. Uji Stasioneritas

**Tabel 1.** Hasil Uji Stasioneritas Data

Variabel	Uji akar unit			
	Level		1 <sup>st</sup> Difference	
	ADF	Prob	ADF	Prob
ECOGROWTH	-2.129046	0.2368	-6.206419	0.0001
DDF	-0.815272	0.7888	-4.552551	0.0030
DOF	-1.060858	0.7056	-4.144063	0.0065
LnTBD	-0.997667	0.7231	-6.680588	0.0001

Sumber : *Eviews 10* (data diolah), 2020

Dapat dilihat pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal dan total belanja daerah dalam uji stasioneritas pada tingkat level variabel-variabel tersebut bersifat tidak stasioner. Data yang tidak stasioner penggunaan datanya

dibutuhkan perlakuan spesial untuk menjauhi adanya regresi lancung atau regresi palsu. Maka perlu dilanjutkan uji derajat integrasi yaitu dengan melakukan uji akar root pada tingkat derajat satu atau  $1^{st}$  *Difference*. Pada pengujian  $1^{st}$  *Difference* diketahui bahwa variabel-variabel bersifat stasioner yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas  $< 0,05\%$ .

2. Uji Kointegrasi

Langkah sebelum dilakukannya uji kointegrasi, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan regresi untuk persamaan jangka panjang agar diperoleh nilai residual. Setelah diperoleh hasil regresi, kemudian diperoleh nilai residual (*Error Corection Term*) yang selanjutnya dilakukan uji stasioner terhadap nilai residual atau *Error Corection Term* (ECT). Pengujian kointegrasi dilakukan dengan pengujian *Augmented Dickey Fuller unit root test* terhadap nilai residu. Hasil uji

kointegrasi pada persamaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil Uji kointegrasi

Variabel	Coefficient	Prob	Keterangan
ECT	-4.840042	0.0015	Ada kointegrasi

Sumber : *Eviews* 10 (data diolah), 2020

Berdasarkan hasil pengujian menerangkan bahwa nilai probabilitas ECT  $< 0,05$ . Selain itu, nilai *coefficient* ECT bernilai negatif yaitu sebesar -4.840042. Hal ini menjelaskan bahwa persamaan dalam jangka panjang mempunyai hubungan keseimbangan. Maka dapat dilakukan pengujian ECM (*Error Corection Model*) selanjutnya.

3. Model ECM

Dalam melakukan estimasi, parameter-parameter yang diestimasi harus linear, maka digunakan fungsi ln. Hasil pengolahan data dengan estimasi model ECM diperoleh persamaan dalam jangka pendek sebagai berikut:

**Tabel 3.** Estimasi Regresi Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.026560	0.179921	-0.147619	0.8851
D(DDF)	-0.199724	0.161474	-1.236877	0.2398
D(DOF)	0.081973	0.100303	0.817250	0.4297
D(ln(TBD))	2.303161	1.004835	2.292078	0.0408
ECT(-1)	-1.335042	0.266672	-5.006298	0.0003
R-squared	0.700037	Mean dependent var	0.230000	
Adjusted R-squared	0.600050	S.D. dependent var	0.700714	
S.E. of regression	0.443143	Akaike info criterion	1.450079	
Sum squared resid	2.356505	Schwarz criterion	1.695142	
Log likelihood	-7.325670	Hannan-Quinn criter.	1.474439	
F-statistic	7.001250	Durbin-Watson stat	1.920919	
Prob(F-statistic)	0.003788			

Sumber : *Eviews 10* (data diolah), 2020

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menerangkan probabilitas Jarque-Bera senilai 0.904949, maka dengan probabilitas senilai 0.904949 lebih dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dapat disimpulkan residual model regresi berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Nilai VIF derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal dan total belanja daerah memiliki nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan model pada ketiga variabel independen tersebut tidak terjadi

multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Nilai *Chi-Square* senilai 0.1678 dan 0.2837 lebih dari nilai signifikansi 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan model penelitian ini model regresi memiliki varian residual tetap (homokedastisitas) dengan kata lain terbebas dari heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Nilai probabilitas *Chi-Square* pada *LM Test* senilai 0.8584 lebih dari tingkat signifikansi 0,05(5%), maka dapat dijelaskan model regresi antar residual pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

c. Hasil Uji Statistik

1) Koefisien Determinasi  $R^2$

Hasil uji koefisien determinasi nilai *Adjusted R-squared* pada persamaan regresi ECM senilai 0.600050, maka menunjukkan proporsi pengaruh variabel derajat desentralisasi fiskal (DDF), derajat otonomi fiskal (DOF), dan total belanja daerah (TBD) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi senilai 60,0050%. Artinya derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal dan total belanja daerah memiliki porsi pengaruh terhadap pertumbuhan senilai 60,0050%, sedangkan sisanya 39,995 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.

2) Uji Signifikansi secara Parsial (Uji t)

a. Pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo periode 2001-2018 dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil pengujian statistik pada persamaan jangka pendek didapatkan t hitung sebesar 1.236877. Dengan nilai t tabel

senilai 1.99547. Maka t hitung  $< t$  tabel yaitu  $1.236877 < 1.99547$  dan nilai probabilitas senilai 0.2398 lebih dari  $\alpha = 2.5\%$  sedangkan dalam persamaan jangka panjang didapatkan t hitung senilai 0.074597. Maka t hitung  $< t$  tabel yaitu  $0.074597 < 1.99547$  dan nilai probabilitas senilai 0.9416 lebih dari  $\alpha = 2.5\%$ . Berarti dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel derajat desentralisasi fiskal terhadap variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

b. Pengaruh derajat otonomi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo periode 2001-2018 dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil pengujian statistik dalam persamaan jangka pendek didapatkan t hitung senilai 0.817250. Dengan nilai t tabel senilai 1.99547. Maka t hitung  $< t$  tabel yaitu  $0.817250 < 1.99547$  dan nilai

probabilitas senilai 0.4297 lebih dari  $\alpha = 2.5\%$  sedangkan dalam persamaan jangka panjang didapatkan t hitung senilai 0.858313. Maka t hitung  $<$  t tabel yaitu 0.858313  $<$  1.99547 dan nilai probabilitas senilai 0.4052 lebih dari  $\alpha = 2.5\%$ . Berarti dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel derajat otonomi fiskal terhadap variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

- c. Pengaruh total belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo periode 2001-2018 dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil pengujian statistik dalam persamaan jangka pendek didapatkan t hitung senilai 2.292078. Dengan nilai t tabel senilai 1.99547. Maka t hitung  $>$  t tabel yaitu 2.292078  $>$  1.99547 dan nilai probabilitas senilai 0.0408 kurang dari  $\alpha = 2.5\%$  sedangkan dalam persamaan

jangka panjang didapatkan t hitung senilai 6.678792. Maka t hitung  $>$  t tabel yaitu 6.678792  $>$  1.99547 dan nilai probabilitas senilai 0.0000 kurang dari  $\alpha = 2.5\%$ . Berarti dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel total belanja daerah terhadap variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan.

- 3) Uji Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Menurut hasil estimasi model ECM didapatkan F hitung senilai 7.001250, nilai F hitung  $>$  F tabel yaitu 7.001250  $>$  2.74 dengan probabilitas senilai 0.003788 kurang dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Maka, bisa dikatakan variabel derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal, dan total belanja daerah pada jangka pendek maupun jangka panjang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2018.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal**

### **Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo periode 2001-2018**

Hasil diperoleh bahwa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang variabel derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo dikarenakan pendapatan asli daerah dalam kenyataan masih jauh dari pelaksanaannya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah tersebut secara maksimal serta mampu dalam menunjang kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan daerah adalah PAD. PAD di Kabupaten Wonosobo masih relatif rendah daripada total pendapatan daerah karena sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2018 masih belum optimal yaitu rata-rata masih dibawah 20 persen.

Penelitian ini sepemikiran dengan Hilmi (2015) yang meneliti tentang analisis kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil Hilmi yang mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, artinya semakin tinggi rasio kemandirian

daerahnya tidak akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian Prakoso (2019) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial.

### **Pengaruh Derajat Otonomi Fiskal**

#### **Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

### **Kabupaten Wonosobo periode 2001-2018**

Hasil diperoleh bahwa variabel derajat otonomi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Demikian menyatakan bahwa pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan kekuatan lokal yang dimilikinya. Seharusnya daerah mampu mengimbangi kekuatan dari luar dengan memaksimalkan potensi lokal, salah satunya dengan meningkatkan investasi. Capaian nilai investasi yang rendah disebabkan kurangnya promosi investasi yang dilakukan sehingga informasi tentang potensi investasi belum banyak diketahui calon investor, tidak adanya informasi daerah/zona mana yang diperbolehkan untuk investasi, masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memperpanjang izin usaha, dan banyak peraturan/regulasi yang menghambat datangnya penanam modal.

Serta Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wonosobo lebih rendah daripada bantuan pemerintah provinsi pada tahun 2001 sampai 2018 yaitu masih memiliki rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 11 persen daripada bantuan pemerintah provinsi sebesar 89 persen. Sehingga dalam era otonomi, daerah belum bisa dikatakan mampu atau mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri dalam terwujudnya daerah yang mandiri dan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian ini sepemikiran dengan penelitian Apriana (2010) yang mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan daerah (derajat otonomi daerah) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian Nurulita (2018) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Total Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo periode 2001-2018**

Hasil diperoleh bahwa variabel total belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan

karena adanya peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung yang meningkat akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun pada pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena proses distribusi pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung ini kepada masyarakat dilakukan melalui pelayanan publik yang dilakukan pegawai pemerintah. Pelayanan publik ini, seperti pelayanan perizinan investasi, pelayanan perpanjangan surat-surat dan lainnya. Sementara itu, dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung maka porsi untuk pembangunan infrastruktur akan semakin besar. Tersedianya infrastruktur yang memadai serta adanya pelayanan publik yang semakin baik sehingga diharapkan dapat memperlancar proses kegiatan ekonomi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini sepemikiran dengan penelitian Haryanto (2013) menerangkan terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil Haryanto yang mengungkapkan bahwa belanja tidak langsung dan belanja langsung

secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian Jelilov (2016) yang menyatakan memiliki dampak positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat Otonomi Fiskal, dan Total Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo periode 2001-2018**

Hasil analisis model ECM dari uji F diketahui F hitung senilai 7.001250 lebih dari F tabel senilai 2.74 dengan probabilitas variabel yaitu 0.003788 lebih kecil dibanding  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal, dan total belanja daerah secara bersama-sama (simultan) dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

### **KESIMPULAN**

1. Derajat desentralisasi fiskal tidak mempunyai pengaruh signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga setiap meningkatnya derajat desentralisasi fiskal tidak selalu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo selama periode 2001-2018.

2. Derajat otonomi fiskal tidak mempunyai pengaruh signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga setiap meningkatnya derajat otonomi fiskal tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo selama periode 2001-2018.
3. Total belanja daerah mempunyai pengaruh signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga setiap meningkatnya total belanja daerah akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo selama periode 2001-2018.
4. Derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal, dan total belanja daerah mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga setiap peningkatan derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal, dan total belanja daerah akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo selama periode 2001-2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Dina, dan Rudy Suryanto. 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol 11 No 1. Januari. Hal 68-79.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2010-2018. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah*. Diakses dari <https://bps.jateng.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2000-2014. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah*. Diakses dari <https://bps.jateng.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Diakses dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta : Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2015. *Dasar dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat
- Haryanto, Tommy Prio. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011. *Jurnal Economics Development Analysis Journal*. Vol.2 No 3. Hal 148-158.
- Jelilov, Gylych dan Muhammad Musa. (2016). The Impact Of Government Expenditure On Economic Growth In Nigeria. *Sacha Journal Of Policy And Strategic Studies*. Vol. 5 No. 1 Hal 15-23.
- Nurulita, Suci, Hamdani Arifulsyah, dan Yefni. 2018. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*. Vol.3. No. 3. Hal 336-356.
- Prakoso, Jalu Aji, Fitrah Sari Islami, dan Retno Sugiharti. 2019. Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol 4 No 1. Hal 87-100.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo.2016-2021. RPJMD Kabupaten Wonosobo.
- Destiningsih,Rian, Andhatu Achsa, dan Yustirania Septiani. 2019. Analisis Potensi Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus : Tahun 2010-2016). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol 4 No 1. Hal 73-86.
- Risyanto, Hilmi. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004- 2013. *Coopetition*. Vol VI. No 1. Hal 21-33.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian*

*Kuantitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews edisi 4*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.